



EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 44 B Telukbetung Utara

Telp./Fax. (0721) 470305 Bandar Lampung 53211

Email: disperindag@lampungprov.go.id



Kata Pengantar

Alhamdulillah hirobbil alamin dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Triwulan IV Tahun 2022 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan atas hasil kerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sekaligus merupakan pertanggung jawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Dari laporan ini diperoleh gambaran pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2022 serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di tahun berikutnya.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2023.

KEPALA DINAS



ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP 19730524 199703 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Tujuan.	3
1.3 Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan.	4
BAB II PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD DENGAN RENSTRA SKPD	7
BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD	20
3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Triwulan IV tahun 2022	20
3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2022	22
BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA	72
4.1 Hambatan dan Kendala.	72
4.2 Upaya Pemecahan Masalah.	72
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	74
5.1 Kesimpulan.	74
5.2 Rekomendasi.	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdiri atas dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Provinsi di sektor perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi tersebut tentunya perlu disikapi secara transparan dan bertanggungjawab, mengingat hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat akan kebutuhan transparansi serta akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka untuk itu perlu disusun Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2022.

Upaya tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Dalam penjelasan mengenai peraturan tersebut, dirumuskan bahwa salah satu azas adalah azas akuntabilitas yaitu asas yang menuntut bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antarprovinsi sebagaimana dimaksud, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD provinsi masing-masing yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud, harus dapat menjamin perumusan:
 - a. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi masing-masing;
 - c. Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya;
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, selaras dengan RTRW provinsi lainnya;
 - e. Prioritas pembangunan jangka panjang daerah provinsi, selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;

- f. Pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah provinsi, sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD provinsi.
4. Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi, telah mengacu pada RPJPN dan berpedoman pada RTRW provinsi masing-masing, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

1.2. Tujuan

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD bertujuan untuk mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada “Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan

perdagangan serta menjaga stabilitas harga di Provinsi Lampung”. Tujuan pembangunan tersebut kemudian dijabarkan dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian provinsi lampung. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian provinsi lampung. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
2. Menjaga stabilitas harga. Sasaran yang ingin dicapai adalah menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya yaitu laju inflasi.

1.3. Indikator Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi *core area/business area* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Guna mewujudkan visi dan misinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menetapkan Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%/thn)
2. Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB (%/thn)
3. Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)
4. Andil inflasi bahan makanan (%/thn).

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi (%)	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	-	5	5,8	6	6,3
			2. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-	5,3	6,3	6,8	7,2
			3. Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	-	3,3	3,48	3,64	3,8
2	Menjaga stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	-	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 2

BAB II
PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA RENJA DENGAN RENSTRA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Program pembangunan pada Renstra yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terdapat 9 Program, 21 Kegiatan dan 55 Sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 35.506.967.723,- yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022 program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebanyak 8 Program, 18 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.958.434.200,- yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga terdapat 1 Program, 3 Kegiatan dan 9 Sub kegiatan Renstra yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022.

Dibawah ini kami sajikan dalam tabel, persandingan Renstra dengan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 beserta tujuan, sasaran, indikator sasaran, target indikator sasaran, indikator program dan kegiatan, target kinerja program kegiatan, dan pagu pendanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
Menjaga Stabilitas Harga	Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil Inflasi bahan makanan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antarwaktu	5 - 6,5%	355.000.000	6%	355.000.000
				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan harga melalui sistem informasi	12	305.000.000	12	305.000.000
				1 Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis	1	55.000.000	1	55.000.000
				2 Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan stabilisasi harga pangan pokok	5	250.000.000	3	250.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat daerah Provinsi melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	75%	50.000.000	75%	50.000.000
				1 Pengawasan, Penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90% (laporan)	6	50.000.000	6	50.000.000
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	10	268.000.000	10	278.000.000
				Penyelenggaraanpromosi dagang melalui pameran dagangn dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasiitasi promosi dagang	50	268.000.000	50	278.000.000
				1 Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi (produk)	13	100.000.000	10	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				2	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina (pelaku Usaha)	80	168.000.000	120	178.000.000
	Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase cakupan barang beredar yang diawasi	15%	718.000.000	15%	903.540.000
					Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	1	30.000.000	3	190.540.000
				1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah BPSK yang aktif	1	30.000.000	1	190.540.000
					Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu	1%	468.000.000	1%	573.000.000
				1	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensi yang dipantau (komoditi)	10	50.000.000	10	50.000.000
				2	Pengembangan Layanan pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	5	130.000.000	7	190.000.000
				3	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan	1.915	238.000.000	1.915	283.000.000
				4	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan	40	50.000.000	40	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
					Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	15 %	220.000.000	15%	140.000.000
				1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi (laporan)	20	180.000.000	11	100.000.000
				2	Fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuanperlindungan konsumen	Jumlah kasus yang di tangani (kasus)	1	40.000.000	1	40.000.000
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase IKM/PKM unggulan/Potensi yang memperoleh fasilitasi pemasaran	10 %	1.025.000.000	10%	1.341.000.000
					Pelaksanaan promosi produ dalam negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	15	925.000.000	15%	1.025.000.000
				1	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersetaraan dan pertisipasi pada pameran produk dalam negeri (UKMKM)	10	925.000.000	10	1.025.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
					Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	15	100.000.000	15%	316.000.000
				1	Fasilitasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Provinsi	Jumlah Laporan pengingatan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer (laporan)	20	50.000.000	65	66.000.000
				2	Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah data informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan (dokumen)	1	50.000.000	1	250.000.000
	Meningkatkan pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri di Provinsi	0.5%	6.137.255.000	0.5%	5.616.683.500
					Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Rata - rata capaian indikator kinerja dalam RPIP	85	6.137.255.000	85	5.616.683.500
				1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran perwilayahan industri (dokumen)	1	3.865.000.000	1	2.743.640.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan sumber daya industri	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan sumber daya industri (dokumen)	80	732.255.000	30	852.255.000
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	40	165.000.000	20	265.000.000
				4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (dokumen)	350	1.305.000.000	120	1.605.788.500
				5	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri (dokumen)	1	70.000.000	1	150.000.000
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	15%	225.000.000	15%	225.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar	15	225.000.000	15	225.000.000
				1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dg resiko usaha menengah dan tinggi, melalui SIINas yang terintegritas dg sistem OSS	1	125.000.000	1	125.000.000
				2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	6	100.000.000	11	100.000.000
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	35%	127.198.000	35%	127.198.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)	12	127.198.000	12	127.198.000
				1	Diseminasi dan Publikasi data informasi dan analisis industri provinsi melalui SIINas	2	107.198.000	2	107.198.000
				2	Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	1	20.000.000	1	20.000.000
				PENUNJANG					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100	19.102.981.200	100%	19.112.012.700
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B	252.528.000	90	176.000.000
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	130.000.000	9	106.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah	5	122.528.000	5	70.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi keuangan	100	15.124.063.700	100	15.220.063.700
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	14.989.063.700	12	15.085.063.700
				2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bulan pentausahaan dan verifikasi keuangann	12	60.000.000	12	60.000.00
				3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1	35.000.000	1	35.000.000
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	40.000.000	12	40.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan administrasi kepegawaian	100	65.000.000	100	64.184.000
				1	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana dispilin pegawai	2	15.000.000	2	15.000.000
				2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan diklat	15	50.000.000	1	49.184.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						K	Rp	K	Rp
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata - rata capaian sub kegiatan	100	1.378.809.500	90	1.397.585.000
				1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Listrik/ penerangan kantor	250	35.000.000	159	27.949.500
				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan ATK	6	286.070.000	6	306.459.000
				3 Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	65	40.000.000	354	40.000.000
				4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12	64.301.000	12	64.301.000
				5 Penyediaan bahan/material	Jumlah kegiatan bahan material yang tersedia	2	100.000.000	2	116.155.000
				6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan dan minum	50	30.000.000	50	30.000.000
				7 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	55	823.438.500	55	812.720.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD	100	34.000.000	100	34.000.000
				1 Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan BMD pada PD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan BMD pada PD	2	17.000.000	2	17.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				2	Penatausahaan BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	1	17.000.000	12	17.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.597.660.000	100	1.619.260.000
				1	Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	100	402.800.000	100	402.800.000
				2	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	1.194.860.000	12	1.216.460.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	10	650.920.000	10	600.920.000
				1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	327.000.000	14	325.000.000
				2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	2	200.000.000	2	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Indikator Tahun 2022	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Tahunan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
							K	Rp	K	Rp
				3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarpras Yang terpelihara	60	75.920.000	56	75.920.000
JUMLAH								27.958.434.200		27.958.434.200

BAB III

CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

3.1. Realisasi Capaian Indikiator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022.

Pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran tahun 2022 pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Pencapaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran kinerja selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya:

3.1. Tabel Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
1	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	Persen	5,8	0,47	Perindustrian
2	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Persen	6,3	15,35	Perdagangan
3	Nilai ekspor non migas	Miliar US\$	3,48	5,18	Perdagangan
4	Andil inflasi bahan makanan	Persen	$\leq 1,5$	5,51	Perdagangan

Sumber : BPS Provinsi Lampung (diolah)

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada tahun 2022 memiliki pagu anggaran berdasarkan APBD sebesar Rp. 27.976.329.772,- (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri 8 (delapan) program pembangunan 18 (delapan belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub-kegiatan.

Tetapi pada perjalanannya kegiatan terjadi penambahan anggaran guna mendukung mekanisme kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.024.525.669,- (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), berdasarkan APBD Perubahan Anggaran 2022 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 29.000.855.441,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 27.747.658.621,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 95% dengan sisa anggaran saat ini sebesar Rp. 1.447.972.355,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

Berikut rincian realisasi capaian program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2022 :

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Outcome)	Target RENSTRA Provinsi pada Tahun 2024 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Provinsi s.d tahun 2021		Target Kinerja dari Anggaran Renja Provinsi Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Tingkat Capaian Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4		5		6		7a		7b		7c		7d		8 =7 (a+b+c+d)/ 7		9 = 5 +7(a+b+c+d)		10 = 9 / 5		11	12
3	URUSAN PENUNJANG																							
3.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	20.048.745.539	0	0	100	18.325.568.031	25	2.714.501.993	25	4.530.786.685	25	4.789.709.658	25	5.002.981.655	100	92,97	100	15.490.154.104	100	77,26	Disperindag	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan	95	280.000.000	0	0	95	219.794.637	25	56.414.000	20	25.190.000	25	35.778.900	25	101.617.300	100	99,64	95	219.000.200	100	78,21	Disperindag	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	9	150.000.000	0	0	9	106.000.000	3	47.618.000	3	13.270.000	1	10.224.000	2	34.254.000	100	99,40	9	105.366.000	100	70,24	Disperindag	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	5	130.000.000	0	0	5	113.794.637	4	8.796.000	0	11.920.000	0	25.554.900	1	67.363.300	100	99,86	5	113.634.200	100	87,41	Disperindag	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	100	15.686.492.539	0	0	100	13.897.458.934	25	2.259.410.819	25	3.821.646.532	25	3.611.103.985	25	3.054.517.301	100	91,72	100	12.746.678.637	100	81,26	Disperindag	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	15.521.492.539	0	0	12	13.762.458.934	3	2.242.722.819	3	3.800.853.532	3	3.554.507.485	3	3.013.680.801	100	91,64	12	12.611.764.637	100	81,25	Disperindag	
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Waktu Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan	12	70.000.000	0	0	12	60.000.000	3	10.000.000	3	9.625.000	3	24.078.100	3	16.296.900	100	100	12	60.000.000	100	85,71	Disperindag	
3.30.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	45.000.000	0	0	1	35.000.000	0	-	0	4.790.000	0	16.486.200	1	13.637.800	100	99,75	1	34.914.000	100	77,59	Disperindag	

3.30.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12	50.000.000	0	0	12	40.000.000	3	6.688.000	3	6.378.000	3	16.032.200	3	10.901.800	100	100	12	40.000.000	100	80,00	Disperindag	
3.30.01.1.03	Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi BMD	100	50.000.000	0	0	100	34.000.000	20	5.217.000	20	5.443.000	35	14.428.000	25	7.763.000	100	96,62	100	32.851.000	100	65,70	Disperindag	
3.30.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD perangkat daerah	2	25.000.000	0	0	2	17.000.000	0	2.657.000	0	2.512.000	0	6.988.200	2	4.033.800	100	95,24	2	16.191.000	100	64,76	Disperindag	
3.30.01.1.03.06	Penatausahaan BMD Pada Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengelolaan BMD	12	25.000.000	0	0	12	17.000.000	3	2.560.000	3	2.931.000	3	7.439.800	3	3.729.200	100	98,00	12	16.660.000	100	66,64	Disperindag	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	100	95.000.000	0	0	100	85.184.000	10	1.874.000	25	10.530.000	15	6.290.000	50	62.645.000	100	95,49	100	81.339.000	100	85,62	Disperindag	
3.30.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Jabatan	2	20.000.000	0	0	2	24.000.000	0	-	1	6.550.000	1	1.600.000	0	15.755.000	100	99,60	2	23.905.000	100	119,53	Disperindag	
3.30.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, bimtek dan diklat	30	75.000.000	0	0	1	61.184.000	0	1.874.000	0	3.980.000	0	4.690.000	1	46.890.000	100	93,87	1	7.434.000	3,33	76,58	Disperindag	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan	95	1.642.253.000	0	0	95	1.563.040.460	10	107.174.000	15	178.357.856	30	508.512.613	40	753.781.418	100	99	95	1.547.825.887	100	94,25	Disperindag	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit listrik/ penerangan kantor	73	45.000.000	0	0	159	27.949.500	40	4.650.000	25	4.650.000	62	11.625.000	32	7.024.000	100	100	159	27.949.000	217,81	62,11	Disperindag	
3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis kelompok barang	590	325.000.000	0	0	6	470.173.888	1	27.000.000	0	10.736.000	3	150.593.000	2	268.153.600	100	97,09	6	56.482.600	1,02	140,46	Disperindag	
3.30.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	75	47.253.000	0	0	354	40.000.000	0	-	117	20.000.000	0	-	237	19.985.000	100	99,96	354	39.985.000	472	84,62	Disperindag	

3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	60.000.000	0	0	12	64.301.000	3	24.116.000	3	9.937.000	3	19.578.000	3	10.640.000	100	99,95	12	64.271.000	100	107,12	Disperindag	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kegiatan penyediaan bahan material	2	150.000.000	0	0	2	100.000.000	0	-	0	-	0	-	2	100.000.000	100	100	2	100.000.000	100	66,67	Disperindag	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan makan dan minum	60	40.000.000	0	0	50	30.000.000	12	5.000.000	8	5.000.000	18	9.500.000	12	9.900.000	100	98	50	29.400.000	83,33	73,50	Disperindag	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	40	975.000.000	0	0	55	830.616.072	8	46.408.000	9	128.034.856	22	317.216.613	16	338.078.818	100	99,89	55	829.738.287	137,50	85,10	Disperindag	
3.30.01.1.08	Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian sub kegiatan	95	1.575.000.000	0	0	95	1.516.670.000	15	214.413.760	20	296.868.047	30	438.934.422	30	489.132.511	100	94,90	95	1.439.348.740	100	91,39	Disperindag	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	100	475.000.000	0	0	100	274.010.000	25	36.113.760	25	64.568.047	25	59.184.422	25	62.042.511	1	80,99	100	221.908.740	100	46,72	Disperindag	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu pelayanan umum kantor	12	1.100.000.000	0	0	12	1.242.660.000	3	178.300.000	3	232.300.000	3	379.750.000	3	427.090.000	100	97,97	12	1.217.440.000	100	110,68	Disperindag	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang yang dilakukan pemeliharaan	15	720.000.000	0	0	15	1.009.420.000	2	69.998.414	4	192.751.250	3	174.661.738	6	533.525.125	100	96,19	15	970.936.527	100	134,85	Disperindag	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	9	425.000.000	0	0	14	343.000.000	3	56.498.414	3	35.951.250	4	103.786.738	4	110.692.145	100	89,48	14	306.928.547	155,556	72,22	Disperindag	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2	225.000.000	0	0	2	585.000.000	0	-	1	149.800.000	1	49.975.000	0	384.857.980	100	99,94	2	584.632.980	100	259,84	Disperindag	
3.30.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras kantor yang terpelihara	50	70.000.000	0	0	56	81.420.000	14	13.500.000	7	7.000.000	15	20.900.000	20	37.975.000	100	97,49	56	79.375.000	112	113,39	Disperindag	

3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN																						
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	5	520.000.000	0	-	5	575.000.000	0	41.347.000	2	151.905.000	0	47.870.000	3	323.480.000	100	98,19	5	564.602.000	100	108,6	Disperidag
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan harga melalui sistem informasi	12	390.000.000	0	0	12	375.000.000	0	41.347.000	6	151.905.000	1	47.870.000	5	131.740.000	100	99,43	12	372.862.000	100	95,61	Disperidag
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis	1	90.000.000	0	0	1	75.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	18.990.000	1	38.010.000	100	100	1	75.000.000	100	83,33	Disperindag
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan stabilisasi harga pangan pokok	7	300.000.000	0	0	3	300.000.000	0	32.347.000	2	142.905.000	0	28.880.000	1	93.730.000	100	99,29	3	297.862.000	42,86	99,29	Disperindag
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase kinerja realisasi pupuk	90	90.000.000	0	-	90	200.000.000	0	-	0	-	0	-	90	191.740.000	100	95,87	90	191.740.000	100	213	Disperindag

3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	8	90.000.000	0	0	6	200.000.000	0	-	0	-	0	-	6	191.740.000	100	95,87	6	191.740.000	75	213	Disperindag	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR	Jumlah produk unggulan yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	10	400.000.000	0	0	40	458.000.000	0	0	5	10.624.000	15	114.184.000	20	333.192.000	100	100	10	458.000.000	100	114,50	Disperindag	
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi promosi dagang	45	400.000.000	0	0	170	458.000.000	0	0	10	10.624.000	65	114.184.000	95	333.192.000	100	100	45	458.000.000	100	114,50	Disperindag	
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah negara tujuan promosi	17	125.000.000	0	0	10	200.000.000	0	-	0	-	0	-	10	200.000.000	100	100	10	200.000.000	58,82	160	Disperindag	
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti pelatihan	125	275.000.000	0	0	120	258.000.000	0	-	30	10.624.000	66	114.184.000	24	133.192.000	100	100	120	258.000.000	96,00	93,82	Disperindag	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase cakupan barang beredar yang diawasi	20	1.045.000.000	0	-	20	1.054.840.000	0	18.000.000	4	58.229.500	6	384.961.100	10	545.004.800	100	95,39	20	1.006.195.400	100	96,2866	Disperindag	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pengetahuan tentang perlindungan konsumen	3	75.000.000	0	0	3	142.840.000	0	-	0	1.784.200	3	111.208.200	0	18.007.000	100	91,71	3	130.999.400	100	174,67	Disperindag	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan pemberdayaan konsumen	1	75.000.000	0	0	1	142.840.000	0	-	0	1.784.200	1	111.208.200	0	18.007.000	100	91,71	1	130.999.400	100	174,67	Disperindag	

3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengujian mutu	1	670.000.000	0	0	1	799.000.000	0	18.000.000	0	56.445.300	0	246.443.400	1	449.347.300	100	96	1	770.236.000	100	114,96	Disperindag	
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah verifikasi mutu produk	14	70.000.000			10	50.000.000	0	-	0	904.400	8	36.518.200	2	12.577.400	100	100	10	50.000.000	71,43	71,43	Disperindag	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium	4	250.000.000	0	0	7	425.000.000	0	-	2	35.952.300	2	37.111.300	3	339.172.400	100	97,00	7	412.236.000	175,00	164,89	Disperindag	
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi mutu komoditi	1955	275.000.000	0	0	1915	274.000.000	287	18.000.000	230	19.588.600	1015	163.785.100	383	56.626.300	100	94,16	1915	258.000.000	97,95	93,82	Disperindag	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah sertifikasi kalibrasi	50	75.000.000	0	0	40	50.000.000	0	-	0	-	0	9.028.800	40	40.971.200	100	100	40	50.000.000	80,00	66,67	Disperindag	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan	20	300.000.000	0	0	20	113.000.000	0	0	0	0	3	27.309.500	17	77.650.500	100	92,88	20	104.960.000	100	34,99	Disperindag	
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengawasan	35	225.000.000	0	0	11	73.000.000	0	-	0	-	4	27.309.500	7	41.950.500	100	94,88	11	69.260.000	31,43	30,78	Disperindag	
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kegiatan fasilitasi	1	75.000.000			1	40.000.000	0	-	0	-	0	-	1	35.700.000	100	89,25	1	35.700.000	100	47,60	Disperindag	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		10	1.250.000.000	0	-	10	1.643.500.000	0	-	0	64.922.000	2	207.737.730	8	1.365.500.000	100	99,68	10	1.638.159.730	100	131,05	Disperidag	

3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan	20	1.000.000.000	0	-	20	1.290.000.000	0	-	2	64.922.000	3	129.673.230	15	1.091.675.000	100	99,71	20	1.286.270.230	100	128,63	Disperidag	
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UKM/PKM yang dipromosikan	15	1.000.000.000	0	0	10	1.290.000.000	0	-	2	64.922.000	1	129.673.230	7	1.091.675.000	100	99,71	10	1.286.270.230	66,67	128,63	Disperindag	
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang mendapatkan fasilitasi	20	250.000.000	0	0	20	353.500.000	0	0	0	0	5	78.064.500	15	273.825.000	100	99,54	20	351.889.500	100	140,76	Disperidag	
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah PKM/UKM yang ditingkatkan kualitas produknya	250	150.000.000	0	0	65	66.000.000	0	-	0	-	45	39.500.000	20	25.000.000	100	97,73	65	64.500.000	26,00	43,00	Disperindag	
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	1	100.000.000			1	287.500.000	0	-	0	-	0	38.564.500	1	248.825.000	100	99,96	1	287.389.500	100	287,39	Disperindag	
3.31	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN																							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri di provinsi	200	6.660.000.000	0	0	650	6.671.947.410	150	438.987.200	50	283.270.500	100	692.810.450	350	5.176.024.932	100	98,79	200	6.591.093.082	100	98,97	Disperindag	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP	90	6.660.000.000	0	0	90	6.671.947.410	20	438.987.200	10	283.270.500	25	692.810.450	35	5.176.024.932	100	98,79	90	6.591.093.082	100	98,97	Disperindag	

3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah kegiatan pengembangan kawasan industri	1	4.000.000.000	0	0	1	1.093.640.000	0	-	0	3.451.900	0	55.887.750	1	1.032.926.996	100	99,87	1	1.092.266.646	100	27,31	Disperindag	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah SDM Industri yang mengikuti vokasi/diklat/ bimtek pelatihan	120	875.000.000	0	0	30	1.674.453.000	15	358.057.300	2	82.000.000	9	186.446.600	4	1.017.297.976	100	98,17	30	1.643.801.876	25,00	187,86	Disperindag	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Unit Usaha Industri yang menerapkan Standarisasi Industri	60	225.000.000	0	0	20	415.000.000	0	-	0	3.998.400	14	158.325.600	6	249.678.000	100	99,28	20	412.002.000	33,33	183,11	Disperindag	
3.31.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mengikuti vokasi/diklat/ bimtek/ pelatihan	400	1.475.000.000	0	0	120	3.338.854.410	18	80.929.900	8	191.820.200	60	218.156.500	34	2.802.375.960	100	98,64	120	3.293.282.560	30,00	223,27	Disperindag	
3.31.02.1.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	1	85.000.000	0	0	1	150.000.000	0	-	0	2.000.000	0	73.994.000	1	73.746.000	100	99,83	1	149.740.000	100	176,16	Disperindag	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Usaha Industri (IUI) Besar yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	25	260.000.000	0	0	25	225.000.000	2	25.086.000	5	57.292.050	8	63.200.000	10	79.362.170	100	99,97	25	224.940.220	100	86,52	Disperindag	

3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI Besar	20	260.000.000	0	0	63	225.000.000	6	25.086.000	13	57.292.050	20	63.200.000	24	79.362.170	100	99,97	20	224.940.220	100	86,52	Disperindag	
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sosialisasi penerbitan IUI	1	135.000.000	0	0	1	125.000.000	0	15.086.000	0	13.282.000	0	35.984.000	1	60.606.450	100	99,97	1	124.958.450	100	92,56	Disperindag	
3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah pengawasan pelaksanaan IUI	7	125.000.000	0	0	11	100.000.000	0	10.000.000	6	44.010.050	4	27.216.000	1	18.755.720	100	99,98	11	99.981.770	157,14	79,99	Disperindag	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri kab/kota yang masuk SIINAS	45	165.000.000	0	0	45	47.000.000	0	-	10	5.248.000	0	-	35	41.752.000	100	100	45	47.000.000	100	28,48	Disperindag	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis (SIINAS)	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri	12	165.000.000	0	0	12	47.000.000	0	-	2	5.248.000	0	-	10	41.752.000	100	100	12	47.000.000	100	28,48	Disperindag	

3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIINas	Jumlah kegiatan diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri provinsi	2	125.000.000	0	0	2	5.248.000	0	-	0	5.248.000	0	-	2	-	100	100	2	5.248.000	100	4,20	Disperindag	
3.31.04.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	1	40.000.000	0	0	1	41.752.000	0	-	0	-	0	-	1	41.752.000	100	100	1	41.752.000	100	104,38	Disperindag	
Rata-rata Capaian Kinerja %																	97,85	97,68			98,90	105,86		
Predikat Kerja																	sangat baik	sangat baik			sangat baik	sangat baik		

Berikut realisasi kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran, akan dijelaskan pada uraian dibawah ini :

1. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan agar menjadi sektor utama penopang perekonomian Provinsi Lampung. Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor terbesar kedua dalam PDRB Provinsi Lampung secara nasional industri pengolahan merupakan sektor terbesar dalam PDB nasional.

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB dimana sampai dengan akhir tahun 2022 masih dengan dasar perhitungan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan PDRB dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dengan target 5,8 dan realisasi sasaran strategis ini adalah 8,42 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini sebagai berikut :

I. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini di dukung oleh kegiatan berikut :

1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 6.671.947.410,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- A. Koodinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri, dengan pagu anggaran Rp. 1.093.640.000,-. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.092.266.646,- (100%).

Sub kegiatan ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengetahui informasi perkembangan rencana persiapan pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM (Sentra Industri Kerajinan Desa Wisata Kampung Tapis).



- b. Mengikuti webinar secara virtual yang diselenggarakan oleh Ditjen KPAII Kementerian Perindustrian RI dan mengadakan rapat pembahasan tentang langkah-langkah dan persiapan yang akan ditempuh dalam mewujudkan Kawasan Industri di Provinsi Lampung.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau terkait Kawasan Industri Halal dari tanggal 26 s/d 28 Juni 2022.



- d. Mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung :
 - o Rakor dilaksanakan di Hotel Horison Jl. RA. Kartini No. 88 Palapa Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 (Fullbord).

- Peserta Rakor berjumlah 60 orang peserta terdiri dari Badan/Dinas/Biro di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- Narasumber berasal dari Ditjen KPAPI dan Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian RI, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



- e. Menyusun Dokumen Feasibility Studies (Dokumen Kelayakan) Kawasan Industri Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.



- f. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kampung Tapis untuk menjangkau aspirasi dan kebutuhan dari pelaku IKM Tapis di masing-masing Sentra Industri Kerajinan Tapis di :

No.	Kegiatan	Tanggal	Peserta
1.	FGD Kampung Tapis Kab. Pringsewu	10 - 11 Nov 2022	50 orang
2.	FGD Kampung Tapis Kab. Tanggamus	14 - 15 Nov 2022	50 orang
3.	FGD Kampung Tapis Kab. Pesisir Barat	17-18 Nov 2022	50 orang



- g. Mengadakan Launching Desa Wisata Kampung Tapis Provinsi Lampung di Pekon Lugusari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu pada Hari Kamis tanggal 15 Desember 2022.

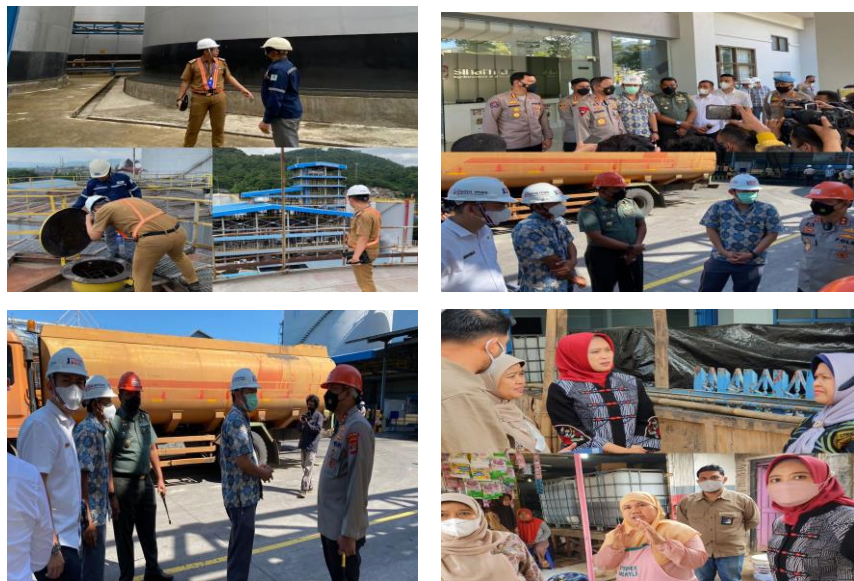


- h. Pemberian bantuan sosial berupa papan nama sentra industri, papan penunjuk arah, dan etalase masing-masing 1 unit untuk 3 Sentra Industri Desa Wisata Kampung Tapis :
- Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat

- Pekon Lugu Sari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu
- Pekon Sumber Mulyo/Sailing Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus.

B. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan pagu anggaran Rp. 1.674.453.000,-. realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.643.801.876,- (100%). kegiatan ini pendukung diantaranya adalah :

1. Pengawasan terhadap penyebaran minyak goreng curah bersubsidi terhadap 4 perusahaan dan koordinasi terhadap produsen dan distributor di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk pengawasan kepatuhan terhadap industri besar yang menjadi kewenangan provinsi telah dilakukan pengawasan terhadap 6 perusahaan di wilayah Provinsi Lampung.



Dokumentasi.

2. Melaksanakan kegiatan link and match antara industri dengan Lembaga Pendidikan Vokasi (SMKN 8 Bandar Lampung), adapun maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk membangun keterlibatan dunia industri pada Pendidikan vokasi SMK guna melahirkan SDM vokasi yang unggul dan hebat di Provinsi Lampung.



- Mengikuti pameran Indonesian Premium Cooffee di Lapangan Banteng Jakarta pada tanggal 24 s.d. 26 Juni 2022.



- Mengikuti pameran Inacraf di DCC Senayan Jakarta pada tanggal 23 s.d. 27 Maret 2022.



C. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Dengan pagu anggaran Rp. 415.000.000,- dengan terealisasi anggaran sebesar Rp. 412.002.000,- (100%). Sub kegiatan ini didukung oleh kegiatan berupa :

- Sosialisasi Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (PTKDN) bagi Produk IKM Provinsi Lampung, yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2022 di Hotel Horison Bandar Lampung.



- Bimtek Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Fasilitasi Sertifikasi HACCP IKM Makanan, diselenggarakan pada tanggal 18-20 Juli 2022 di Hotel Kurnia 2 Bandar Lampung.



- Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), diselenggarakan pada tanggal 12 April 2022 di Pusiban Kantor Gubernur Lampung.



D. Koordinasi, Singkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan pagu anggaran Rp.

3.338.854.410,- dan realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.293.282.560,- (100%). Sub kegiatan ini berada di 2 Bidang yaitu :

Subkegiatan didukung oleh beberapa kegiatan , diantaranya :

- ✓ Bimtek PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diselenggarakan di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 24 Maret 2022 dan di Kabupaten Mesuji pada tanggal 29 Maret 2022 dengan jumlah seperti 30 dari setiap kabupaten.



- ✓ Bimtek Dispersifikasi Turunan Tapis (homedekor) yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta 50 UKM dari Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur.





- ✓ Bimtek Dispersifikasi Pembuatan tepung Pisang yang dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 September 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung. Dengan jumlah peserta 50 UKM dari Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Timur.



- ✓ **Kurasi Produk Kopi Lampung**

Dilaksanakan mulai dari tanggal 16 September – 3 November 2022 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.





✓ **Lomba Tiktok Barista Lampung**

Dilaksanakan pada tanggal 19 - 30 September 2022 yang mana pelaksanaannya tersebar di Kabupaten/Kota SeProvinsi Lampung.

✓ **Seminar / Talkshow Kopi, Coaching Clinic Barista, Lomba Tata Hidang Makanan Berbahan Kopi.**

Dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022 di Gedung Graha Wangsa, Bandar Lampung.



✓ **Pameran Kopi Lampung**

Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta pada tanggal 8 s.d 9 Oktober 2022, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. **Ngobrol Kopi (NGOPI) Robusta Lampung**

pelataran Gedung Sarinah Thamrin, Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB – 21.00 WIB.



2. Robusta Lampung Car free Day

9 Oktober 2022 pukul 07.00 WIB – 09.00 WIB



3. Bedah Resep Kekhasan Robusta Lampung oleh Juara Dunia Barista. Yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB,



4. Temu Bisnis Kopi

9 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB



- ✓ **Bimtek Peningkatan SDM IKM Hasil Tembakau.** 23 November – 25 November 2022 di Hotel Arnes, Bandar Lampung dengan jumlah peserta 20 orang.



- ✓ **Hibah Alat Ukur Kualitas Tembakau sebagai Bahan Baku Rokok.** Hibah alat diberikan kepada IKM hasil tembakau di Kabupaten Lampung Timur. Diharapkan melalui hibah tersebut dapat meningkatkan kualitas serta efisiensi dalam memilih tembakau sebagai bahan baku rokok.



- Pada UPTD Kemasan telah melaksanakan Sosialisasi bantuan kemasan terhadap 20 IKM dari Kabupaten/Kota yang belum memiliki kemasan yang sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan pada

tanggal 23 – 27 Mei 2022 di Kantor UPTD – IPOK Bandar Lampung, konsultasi dilakukan oleh 5 IKM setiap jam kerja.



- a. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,-. Sub kegiatan ini telah melakukan Pemantauan Progress RIPK dan Sosialisasi Registrasi IKM ke aplikasi SiKam dengan Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten TBB, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Utara. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 149.740.000,- (100%).



II. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 225.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sisten Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,-. Sub kegiatan ini berupa kegiatan yang mendorong perusahaan untuk memproses izin usaha sesuai dengan PP No.5 tahun 2021, guna falisitasi perusahaan industri perolehan izin usaha industri yang terintegritas secara elektronik. Adapun perusahaan yg sudah terfasilitasi terhadap permohonannya diantaranya 9 perusahaan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.124.958.450,- (100%).



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi. Dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,-. Sub kegiatan ini melakukan koordinasi lingkup wasdal dalam bentuk pengawasan perizinan pada 21 perusahaan di wilayah Provinsi Lampung, serta pembuatan aplikasi web untuk data base industri. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 99.981.770,- (100%).



III. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan pagu anggaran Rp. 47.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui SIIs, dengan pagu anggaran Rp. 5.248.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.248.000,- (100%).

- b. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas, dengan pagu anggaran Rp. 41.752.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar 41.752.000,- (100%).

2. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Pencapaian realisasi target kinerja dalam pertumbuhan sektor perdagangan didukung oleh berbagai macam kegiatan pendukung dari beberapa program dan sumber dana yang berbeda, baik APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 maupun dana APBN melalui dana Dekonsentrasi.

Sasaran kinerja yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kontribusi sektor perdagangan merupakan sektor terbesar dalam PDRB Provinsi Lampung maupun dalam PDB Nasional. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah laju pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target 6,3 dan realisasi sasaran strategis pada tahun 2022 dari rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sebesar 16,17. Program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

I. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp. 1.290.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 1.290.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.286.270.230,- (100%). Sub kegiatan ini didukung oleh beberapa event diantaranya :
 - Koordinasi pada kementerian Perdagangan RI dalam rangka pengambilan bantuan fasilitasi perdagangan untuk mendukung

sarana promosi IKM/UKM di Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Lampung.

- Event Bazar Rebo yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2022 di Lapangan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.



- Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 06 s/d 07 Desember 2022 bertempat di Halaman Kantor Bupati Kabupaten Lampung Utara.



- Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 20 Desember 2022 dimulai pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Lapangan Kelurahan Desa Sribawono Kecamatan Sribawono Kabupaten Lampung Timur.



- Bazar Kuliner/Produk UKM/IKM Lampung, 27 Oktober 2022 di Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Mesuji.



- Semarak IKM atau apresiasi IKM/UKM yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 dimulai pukul 08.00 WIB s/d selesai bertempat di Lapangan Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung (Halaman depan Gedung Sumpah Pemuda), dengan rangkain acara sebagai berikut :
 1. Launching galery sikam
 2. Lomba masakan olahan terasi
 3. Live cooking bersama Chef Rissana Ica
 4. Bazar IKM/UKM
 5. Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok
 6. Apresiasi IKM/UKM
 7. Penyerahan bantuan



2. Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan pagu anggaran Rp. 353.500.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Fasilitas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 66.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan berupa Sosialisasi fasilitasi merk dagang kepada 50 UKM yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung bekerjasama dengan Kemhum dan HAM. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 64.500.000,- (100%).





- b. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, dengan pagu Rp. 287.500.000,- Sub kegiatan ini telah melakukan kajian dua (2) dokumen rantai pasokan distribusi komoditi cabe merah dan lada, pada tahun 2022 untuk realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 287.389.500,- (100%).

II. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 142.840.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 - a. Pembedayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen, dengan pagu anggaran Rp. 142.840.000,- Sub kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) pada tanggal 26 Agustus 2022 di Lapangan Korpri Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 130.999.400,- (100%).



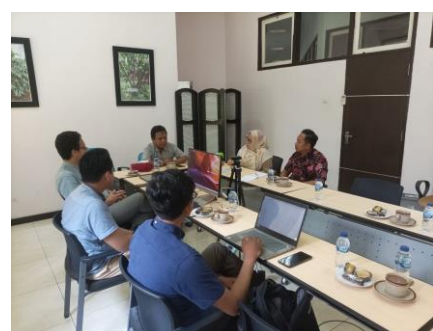


2. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 799.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Verifikasi Mutu Produk, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,-
Sub kegiatan ini telah memberikan fasilitasi uji mutu barang terhadap 30 perusahaan se-Propinsi Lampung, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (100%).
- b. Pengembangan Layanan Pengujian, dengan pagu anggaran Rp. 425.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 412.236.000,- (100%). Sub kegiatan meliputi beberapa kegiatan diantaranya :
 - Pengambilan sampel untuk uji laboratorium komoditi kopi, lada, kakau dan beras.
 - Pembelian beberapa bahan kimia sebagai pendukung kegiatan uji laboratorium guna peningkatan mutu.
 - Kajian Balai Layanan Usaha Daerah (BLUD) pada bulan agustus s.d. September 2022.
 - Penyusunan Pergub tentang Standarisasi Kualitas Kopi Bubuk Lampung.



- c. Pengembangan Layanan Sertifikasi, dengan pagu anggaran Rp. 274.000.000,- Sub kegiatan ini telah melakukan uji laboratorium komoditi kopi, lada, kakau dan beras serta telah menerbitkan sertifikat uji laboratorium sebanyak 1.157 sertifikat. Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 258.500.000,- (100%).
- d. Pengembangan Layanan Kalibrasi, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (100%). Sub kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya berupa :
- ✓ Sertifikasi Kalibrasi alat penguji laboratorium komoditi sebanyak 12 alat.
 - ✓ Studitiru ke BPSMB Surakarta Jawa Tengah, Direktorat STANDALITU Kemendag RI dan BPSMB Provinsi Jambi serta Laboratorium Cita Rasa Puslitkoka Jember dalam rangka pengembangan ruang lingkup layanan kalibrasi.



3. Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 113.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan pagu anggaran Rp. 73.000.000,- Sub kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan berupa pengawasan merk SNI terhadap barang elektronik dan mendapatkan total 2.016 temuan dari Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten TBB, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 69.260.000,- (100%).



- b. Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perlindungan Konsumen, dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 35.700.000,- (100%).

3. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Salah satu tupoksi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah pelaksanaan tugas di bidang perdagangan luar negeri. Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya meningkatnya nilai perdagangan luar negeri dengan indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah nilai ekspor non migas.

Sasaran ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja ekspor serta meningkatkan kualitas barang ekspor agar dapat bersaing di pasar Internasional sehingga memiliki kontribusi lebih besar bagi perekonomian Provinsi Lampung. Nilai ekspor non migas Provinsi Lampung sampai dengan bulan November tahun 2022 sebesar 3,55 Miliar US\$ atau 21%. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

I. Program Pengembangan Ekspor.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 458.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

Peningkatan Citra Produk Ekspor, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,- Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (100%). Sub kegiatan ini berupa 2 event diantaranya :

- ✓ Pameran Indonesia Tourism & Trade Investment Expo “Bali Prioritas “ dilaksanakan di Level 21 mall Denpasar Provinsi Bali.



- ✓ Kegiatan Pameran “ Gelar Produk Unggulan Khas Daerah Pariwisata Dan Investasi Tahun 2022”, dilaksanakan di

Cihampelas Walk Bandung pada tanggal 17 s/d 20 November 2022.



- a. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 258.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.808.000,- (100%). Sub kegiatan ini telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

- FGD terkait ongkos freight pengapalan dan container, diselenggarakan pada tanggal 11 oktober 2022 di Hotel Green Praba Bandar Lampung.



- FGD kebijakan ekspor produk CEO dalam upaya stabilitasi Minyak Goreng, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung.



- Pendampingan dan Pelatihan bagi UKM untuk menembus pasar ekspor (CPNE), diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Agustus 2022 di Hotel Yuna Bandar Lampung.



Target kinerja pada tahun 2022 untuk nilai perdagangan luar negeri melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor dengan indikator nilai ekspor non migas adalah sebesar 3,48 Miliar US\$. Nilai ekspor non migas yang dicatat oleh Provinsi Lampung sampai dengan bulan agustus 2022 adalah sebesar 5,18 Miliar US\$. Berikut kami sajikan data ekspor non migas Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tabel 3.4. Data Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Bulan	Nilai Ekspor (Juta US\$)
1	Januari	332,37
2	Februari	331,01
3	Maret	585,04
4	April	374,80
5	Mei	297,76
6	Juni	526,89
7	Juli	430,90
8	Agustus	674,55
9	September	552,00
10	Oktober	639,77
11	November	441,66
12	Desember	419,51
TOTAL Nilai Ekspor		5,606,26

Sumber data : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan table diatas, nilai ekspor tahun 2022 sebesar 5,606,26 juta US\$ atau 5,60 Miliar US\$. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Lampung selalu berfluktuasi. Dimana nilai ekspor tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2022 dengan nilai sebesar 674,55 juta US\$. Sedangkan nilai ekspor terendah berapa pada bulan Mei dengan nilai sebesar 297,75 juta US\$, kemudian dibawah ini kami sajikan table perbandingan kinerja ekspor non migas Provinsi Lampung pada tahun 2021 dengan tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel. 3.5. Perbandingan nilai ekspor non migas tahun 2021 dan 2022

No	Bulan	Nilai Ekspor Tahun 2021 (Juta US\$)	Nilai Ekspor Tahun 2022 (Juta US\$)	Kenaikan/ Penurunan (Juta US\$)	Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
----	-------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

No	Bulan	Nilai Ekspor Tahun 2021 (Juta US\$)	Nilai Ekspor Tahun 2022 (Juta US\$)	Kenaikan/ Penurunan (Juta US\$)	Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Januari	309,46	332,37	22,91	7
2	Februari	287,14	331,01	48,87	15
3	Maret	378,52	585,04	206,52	55
4	April	302,80	374,80	72,00	24
5	Mei	331,73	297,76	-33,97	-10
6	Juni	387,21	526,89	139,68	36
7	Juli	425,43	430,90	5,47	1
8	Agustus	514,70	674,55	159,85	31
9	September	491,41	552,00	60,59	12
10	Oktober	600,26	639,77	39,51	7
11	November	337,81	441,66	63,85	17
12	Desember	437,56	419,51	-18,05	-4
TOTAL		4,844,040	5,606,26	762,22	16

Sumber data : BPS Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa kinerja ekspor non migas Provinsi Lampung pada bulan desember tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan periode tahun sebelumnya, namun nilai total ekspor lampung tahun 2022 lebih tinggi di banding nilai total ekspor tahun 2021 sebab secara keseluruhan sektor ekspor Lampung mengalami peningkatan.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan penurunan nilai ekspor bulan desember tahun 2022 jika dibandingkan periode bulan desember tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal :

- Turunnya permintaan dan harga komoditas dari negara tujuan ekspor lampung seperti India, Malaysia dan Tiongkok.
- Penurunan terjadi dikarenakan perubahan nilai dan volume ekspor lampung.

Selain faktor eksternal, terdapat faktor – faktor dari dalam yang juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam mencapai target kinerja ini, diantaranya adalah :

- Masih rendahnya informasi serta perkembangan pasar pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.
- Masih dominannya komoditas-komoditas unggulan yang berkontribusi pada nilai ekspor Provinsi Lampung.
- Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Lampung.

4. Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pangan Pokok Penting

Sasaran kinerja ini berkaitan dengan upaya menjaga stabilitasi harga bahan pangan pokok penting untuk melihat laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok di pasaran, komoditi yang dominan memberikan andil dalam pembentukan inflasi bahan makanan diantaranya bawang putih, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur dan gula. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah andil inflasi bahan makanan. Realisasi sasaran strategisnya adalah 0,73% sedangkan target andil inflasi berkisar $\leq 1,5 \%$.

Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini berupa:

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk menunjang perkembangan sektor perdagangan diprovinsi lampung. Adapun kegiatan program ini yang mendukung indikator kinerja ini antara lain:

1. Pengendalian harga informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan, dengan pagu anggaran Rp. 375.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- a. Pemantauan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.00,- Sub kegiatan ini melakukan pemantauan harga barang pokok pada 3 pasar di bandar lampung pada jenis komoditi seperti bawang putih, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur dan gula. Pemantauan harga di dilaksanakan pada setiap hari kerja. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- (100%).



- b. Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok Yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 Daerah Provinsi, dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,-. Sub kegiatan ini telah melaksanakan pasar murah pada 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro. Selain adanya kegiatan penetrasi pasar yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung juga terdapat kegiatan Bazar Rebo dengan subsidi bahan pokok berupa minyak goreng, telur dan cabai yang pelaksanaanya setiap hari rabu di lapangan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 297.862.000,- (100%).





2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, dengan pagu anggaran Rp. 200.000.00,- Realisasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 191.740.000,- (100%). Sub kegiatan pendukung diantaranya yaitu :

- Melakukan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi pada bulan November 2022 di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tubaba dan Kota Bandar Lampung.



- Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dan Peredaran Pupuk Palsu di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang pada bulan desember 2022.



Program yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan beberapa program atau kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis dan pencapaian kinerja pada sasaran renstra Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung yaitu berupa :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2022 didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan yang terdiri dari :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 219.794.637,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 106.000.000,-. Sub kegiatan ini telah melakukan kegiatan Musrenbang di Hotel Sheraton, FGD Lada dan FGD Mocaf (tepung pisang) yang diselenggarakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 105.366.000,- (100%).



2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 113.794.637,- Sub kegiatan ini berupa penyusunan LAKIP, LPPD, RENJA, LPPID dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.634.200,- (100%).



b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 13.897.458.934,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN, dengan pagu anggaran Rp. 13.762.458.934,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.611.764.637,- (100%).
2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (100%).
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 35.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.914.000,- (100%).
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 40.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (100%).

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 85.184.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai, dengan pagu anggaran Rp. 24.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.905.000,- (100%).

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi, dengan pagu anggaran Rp. 61.184.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.434.000,- (100%).
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 1.563.040.460,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 27.949.500,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.949.000,- (100%).
 2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 470.173.888,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 456.483.500,- (100%).
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan pagu anggaran Rp.40.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.985.000,- (100%).
 4. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan, dengan pagu anggaran Rp. 64.301.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 64.271.000,- (100%).
 5. Penyediaan Bahan/Material, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (100%).
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.400.000,- (100%).
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, dengan pagu anggaran Rp. 830.616.072,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 829.738.287,- (100%).
 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 1.516.670.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dengan pagu anggaran Rp. 274.010.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 221.908.740,- (100%).
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan pagu anggaran Rp. 1.242.660.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.217.440.000,- (100%).
- f. Administrasi BMD Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 34.000.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut:
1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 17.000.000,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- (100%).
 2. Penatausahaan BMD pada Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 17.000.000,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.685.000,- (100%).
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu anggaran Rp. 1.009.420.000,-. Adapun rincian anggaran dari beberapa sub kegiatan prioritas pendukung kegiatan ini sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan pagu anggaran Rp. 343.000.000,-. Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 306.928.547,- (100%).
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 585.000.000,- Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 584.632.980,- (100%).
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 81.420.000,-

Sub kegiatan ini telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.375.000,- (100%).

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam merealisasikan pelaksanaan evaluasi renja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dengan rencana operasional kegiatan maupun rencana arus kas yang telah disusun disebabkan adanya penambahan anggaran guna mendukung mekanisme kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.024.525.669,- (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), sehingga pelaksanaan dari sebagian kegiatan-kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sempat tertunda karena adanya perubahan jadwal/waktu.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kompetensi dari Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Menanggapi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan evaluasi renja tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan upaya pemecahan masalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas lainnya.

2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung walau tidak semuanya dapat ditingkatkan kompetensinya karena terbatasnya anggaran.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di akhir tahun 2022 agar target kinerja terpenuhi secara maksimal sehingga sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat tercapai. Selain itu juga perlunya mengefektifkan penyerapan anggaran sehingga program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Hasil pelaksanaan renja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada renja tahun 2022 mengusulkan akan melaksanakan 8 Program, 18 Kegiatan dan 46 Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.976.329.772,- yang bersumber pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah mengacu kepada renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2020-2024.
2. Rata-rata relisasi fisik kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2022, Tetapi pada perjalanannya kegiatan terjadi penambahan anggaran guna mendukung mekanisme kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebesar Rp. 1.024.525.669,- (satu miliar dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), berdasarkan APBD Perubahan Anggaran 2022 sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 29.000.855.441,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 27.747.658.621,- (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 95% dengan sisa anggaran saat ini sebesar Rp. 1.447.972.355,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

5.2 Rekomendasi

Menanggapi hasil evaluasi renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tahun 2022, kami merekomendasikan tiga hal berikut:

1. Mengefektifkan pelaksanaan seluruh kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sehingga hasilnya optimal dan diharapkan target yang ditetapkan akan tercapai. Melakukan penajaman dan peningkatan kualitas pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini dengan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2021.
2. Menggunakan faktor-faktor penghambat maupun factor pendukung yang dialami sepanjang tahun 2021 sebagai salah satu dasar untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan triwulan selanjutnya.
3. Perlunya dukungan dari pemangku kebijakan anggaran terhadap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung pada triwulan selanjutnya, sehingga dapat menjalankan lebih banyak kegiatan yang telah diusulkan pada renja tahun selanjutnya sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dapat menjalankan tugas pokok serta fungsinya secara utuh dan maksimal.